

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis terkait Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yang sudah dijelaskan di atas dan telah dilakukan pengolahan data di atas, disimpulkan:

1. Bersumber hasil penelitian, nilai signifikansi Rata-Rata Lama Sekolah sejumlah $0,026 < \text{dari } 0,05$ serta t hitung variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X_1) sejumlah $-2,532 < t \text{ tabel } 1.89458$ jadi H_a diterima serta H_o ditolak. Artinya variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
2. Bersumber hasil penelitian, nilai signifikansi Pengangguran sejumlah $0,827 > 0,05$ serta t hitung variabel Pengangguran (X_2) sejumlah $0,224 < t \text{ tabel } 1.89458$ jadi H_o diterima serta H_a ditolak. Artinya antara variabel Pengangguran (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
3. Bersumber hasil uji F Simultan diperoleh signifikansi sejumlah $0,049$ serta f hitung sejumlah $3,910 < f \text{ tabel } 4,74$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan variabel Pengangguran berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak-pihak terkait penelitian serta semoga bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa saran tersebut adalah:

1. Rata-Rata Lama Sekolah yang tercermin dari persentase rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan pada kemiskinan, jadi diharapkan pemerintah di Kabupaten Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2013, pemerintah pusat menetapkan program wajib belajar selama 12 tahun, sebagai kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah

Kabupaten Bekasi harus meningkatkan mutu pendidikan dengan memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan angka siswa yang putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

2. Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan supaya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pasar kerja secara rutin agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh industri dan menyesuaikan program pendidikan serta pelatihan. Langkah ini dapat membantu memastikan lulusan mempunyai kemampuan yang sesuai permintaan pasar, sehingga kesenjangan antara permintaan serta penawaran tenaga kerja. Banyaknya pencari kerja dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK, pemerintah harus meningkatkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan di industri. Kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan pelatihan yang tepat dan pengalaman kerja nyata akan membantu meningkatkan daya saing para pencari kerja lokal.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini supaya dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bekasi.